

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Metodologi Kajian Agama”

WACANA

Hasnim Fadhly-Hassan

**Teori Konflik: Sebuah Review atas Pemikiran
Jonathan H. Turner**

M. Ikhsan Tanggok

**Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian
Agama**

Agus Nugraha

Pemikiran Politik Islam: Suatu Pengantar Awal

Mohammad Nuh Hasan

**Teologi Pembebasan di Amerika Latin:
Perspektif Sosiologi Marxis**

Kusmana

**Rekontekstualisasi Tradisi Tafsir Al-Qur'an di
Indonesia: Mencari Kemungkinan Penggunaan
Analisis Metodologis “Barat”**

TULISAN LEPAS

M. Amin Nurdin

**Agama dan Multikulturalisme: Belajar dari
Pengalaman Australia**

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. IV, No. 3, 2002

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Said Agil H. Al-Munawwar
Amsal Bakhtiar

Pemimpin Redaksi

Kusmana

Anggota Redaksi

Din Wahid
Bustamin

Sekretariat

Burhanuddin

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 395/DIKTI/Kep./2000. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Articles

- 281-306 Teori Konflik: Sebuah Review atas Pemikiran Jonathan H. Turner
Hasnim Fadhlly-Hassan
- 307-320 Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Agama
M. Ikhsan Tanggok
- 321-330 Pemikiran Politik Islam: Suatu Pengantar Awal
Agus Nugraha
- 331-354 Teologi Pembebasan di Amerika Latin: Perspektif Sosiologi Marxis
Mohammad Nuh Hasan
- 355-364 Rekontekstualisasi Tradisi Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Mencari Kemungkinan Penggunaan Analisis Metodologis "Barat"
Kusmana
- 365-406 Pengaruh Wahdat Al-Wujūd dalam Pemikiran Islam di Nusantara
Kautsar Azhari Noer

Document

- 407-418 Agama dan Multikulturalisme: Belajar dari Pengalaman Australia
M. Amin Nurdin
- 419-438 Aborsi dalam Perspektif Agama-agama Samawi
Tien Rohmatin

METODOLOGI KAJIAN AGAMA

DALAM Vol. IV, No. 3, 2002 *Refleksi* mengusung tema pendekatan atau metodologi kajian agama. Tema ini akan diusahakan diangkat sekali dalam setiap periode satu tahunnya. Dalam konteks proses pendidikan agama Islam umumnya dan proses pendidikan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat khususnya dirasakan perlunya pemakaian pendekatan yang non-normatif atau pendekatan historis untuk mendorong berkembangnya model pemahaman keagamaan yang terbuka, di satu sisi dan mendorong tradisi keilmuan yang kuat di sisi lainnya. Karenanya, pewacanaan penggunaan pendekatan-pendekatan historis dalam kajian agama dan publikasi tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut perlu disosialisasikan dengan frekuensi yang relatif sering.

Dalam edisi kali ini, kami memilih delapan tulisan dari sekian tulisan yang masuk ke meja redaksi. Enam tulisan mengisi rubrik wacana dan dua tulisan mengisi rubrik lepas. Tulisan rubrik wacana yang pertama ditulis oleh Hasnim Fadhly-Hassan, yaitu *Teori Konflik: Sebuah Review atas Pemikiran Jonathan H. Turner*. Hassan me-review teori konflik Turner. Mengikuti struktur penulisan Turner, ia membahas asal-usul dan perspektif-perspektif teori konflik, mulai dari Marx, Simmel, dan Weber sampai teori konflik Dahrendorf, fungsionalisme konflik Coser dan teori pertukaran Collins. Teori konflik ini bisa digunakan sebagai basis bagi pengembangan teori dalam memahami konflik-konflik yang terjadi dewasa ini di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang berbasis agama ataupun etnik. Selanjutnya, *Penggunaan Metode Etnografi dalam penelitian Agama*, tulisan M. Ikhsan Tanggok. Dia membahas pengertian, sejarah, tujuan, kerangka, prosedur penelitian etnografi dan apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode ini. *Ketiga* tulisan Agus Nugraha, *Pemikiran Politik Islam: Suatu Pengantar Awal*, membahas pemikiran politik Islam tidak secara rinci dan mendalam, akan tetapi hanya untuk menghantarkan suatu wawasan umum tentang khazanah pemikiran politik. *Keempat*, tulisan Mohammad Nuh Hasan, *Teologi Pembebasan di Amerika Latin: Perspektif Sosiologis Marxis*. Nuh menjelaskan bahwa

kemunculan teologi pembebasan di Amerika Latin didorong oleh dinamika sosial setempat yang memang keras. Yang menarik dari tulisannya adalah analisis Marxis mempunyai peran signifikan dalam membentuk corak gerakan dan pemikiran teologi pembebasan di sana. Kelima, tulisan Kusmana *Rekontekstualisasi Tradisi Tafsir al-Qur'an di Indonesia di Indonesia: Mencari Kemungkinan Penggunaan Analisis Metodologis "Barat."* Kusmana memetakan faktor-faktor pembentuk tradisi tafsir di Indonesia baik yang datang dari Timur Tengah maupun dari Barat. Dia melihat keperluan untuk menyinergikan dua tradisi keilmuan besar ini dan tidak diperlakukan terpisah, karena pada dasarnya keduanya bertumpu pada dasar dan prinsip yang sama, yaitu prinsip-prinsip ilmiah. karenanya tidak ada halangan sedikit pun dalam kajian al-Qur'an seperti tafsir meminjam analisis ilmu yang berkembang di Barat. Dia menyimpulkan pentingnya penggunaan analisis sejarah, komparatif, kontekstual dan hermeneutik dalam kajian tafsir ke depan di Indonesia. Keenam, tulisan Kautsar Azhari Noer *Pengaruh Wahdat al-Wujūd dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Noer dengan menggunakan analisis sejarah mendiskusikan kemunculan, perkembangan dan pasang surut konsep *wahdat al-wujud* di Nusantara. Dia menjelaskan perkembangan konsep ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengitarinya: rumitnya konsep menjadi daya tarik dan tolak sekaligus, respons atas modernisme misalnya yang melihat sesuatu berdasar logika yang sederhana tegas dan jelas tidak mendorong tumbuhnya apresiasi atas konsep *wahdat al-wujud*. Namun demikian kemunculan kecenderungan kontemporer mendorong tumbuh kembalinya apresiasi tersebut.

Dua tulisan terakhir mengisi rubrik tulisan lepas. Pertama, tulisan M. Amin Nurdin, *Agama dan Multikulturalisme: Belajar dari Pengalaman Australia*, mendiskusikan hubungan agama dan multikulturalisme di Australia dan menjadikan pengalaman Australia sebagai *second opinion* dalam memahami persoalan hubungan tersebut di Indonesia dengan mencoba memberi tawaran solusi atas persoalan konflik etnis dan agama di tanah air. Terakhir, kedua, tulisan *Tien Rohmatin Aborsi dalam perspektif Agama-agama Samawi*, mendiskusikan tentang aborsi, mengapa aborsi itu dilakukan dan bagaimana pandangan agama-agama samawi-Islam Kristen dan Yahudi mengenai hal ini. Selamat membaca.

Ciputat, 20 November 2002

Tim Redaksi

AGAMA DAN MULTIKULTURALISME: BELAJAR DARI PENGALAMAN AUSTRALIA

M. Amin Nurdin

LEBIH dari tiga dekade, kaum imigran dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin telah bertempat tinggal di negara-negara demokrasi liberal Eropa dan Amerika Utara. Bahkan kehadiran mereka saat ini terus bertambah berkali lipat dibandingkan dengan jumlah kedatangan pertama. Kedatangan mereka telah memunculkan sejumlah pertanyaan tentang adanya perbedaan budaya dengan prinsip nilai-nilai budaya demokrasi liberal. Apa kebijakan yang diambil negara dalam menjaga integrasi sosial para imigran agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya dominan (*dominant culture*) dan pandangan hidup di tempat mereka yang baru? Dan apa pula, langkah-langkah negara yang harus diambil untuk memelihara warisan

kultural dan identitas kelompok yang telah mereka bawa dari kampung halaman masing-masing? (Baubock, 1996:157).

Bagi negara-negara demokrasi liberal, pertanyaan-pertanyaan di atas dianggap penting, terutama dalam konteks keberadaan beragam etnis, terutama Islam, yang digambarkan memiliki potensi untuk melahirkan konflik sosial politik. Kasus Salman Rusydi di Inggris, kasus *des foulands* di Perancis, dan status pekerja keturunan Turki di Jerman sebagai contoh. Berbagai kasus ini telah memunculkan asumsi bahwa di mana pun kaum Muslim berada akan muncul debat publik tentang arti kewarganegaraan dan tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai demokrasi liberal. Bahkan Huntington menganggap, perbedaan nilai-nilai tersebut akan memicu terjadinya "*clash of civilization*" (pertentangan peradaban) antara Islam dan Barat. Dan kehadiran Islam ditengarai sebagai ancaman Islam terhadap nilai-nilai pandangan hidup Barat. (Black, 1996:176).

Pandangan serupa juga terjadi di Australia. Australia adalah juga sebuah negara imigran dan demokrasi liberal yang dekat dengan benua Asia dan bertetangga dengan Indonesia. Semua agama yang ada di Australia, kecuali agama asli kelompok suku Aborigin, masuk melalui para imigran dari mancanegara sekaligus membawa sistem kepercayaan dan praktik keagamaan mereka, yang ditransformasikan oleh misionari, pendeta, ulama, biksu, dan media publikasi. Dengan demikian, bentuk profil agama di Australia sangat terkait dengan sejarah migrasi bangsa Australia itu sendiri. (Bouma, 1994:11)

Para imigran adalah salah satu penyebab utama terjadinya keberagaman identitas etnik di Australia. Beragamnya budaya dan identitas etnik, sebagai contoh dapat dilihat dari jumlah penduduk Muslim yang berjumlah lk. 300.000 orang (1% lebih) berasal dari 67 negara. Libanon dan Turki adalah negara asal terbanyak penduduk Muslim. Agama Islam merupakan agama kedua setelah agama Kristen yang merupakan pemeluk mayoritas kulit putih Australia (Anglo-Celtic).

Respons negara-negara demokrasi liberal, termasuk Australia terhadap realitas beragamnya etnik-budaya penduduknya yang menjadi kelompok minoritas melalui dua cara, yaitu *ideologi asimilasi* dan *multikultural*. (Jupp, 1991:124). Makalah ini mencoba menjelaskan kaitan budaya, multikulturalisme dan agama di Australia dalam kerangka keberagaman budaya di atas.

Ideologi Asimilasi yang Rasis Vs. Ideologi Multikultural

Kemajuan ekonomi dan perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi di Australia setelah Perang Dunia II telah memberikan pengaruh besar terhadap identitas nasional Australia dan identitas etnis Australia. “Boom ekonomi’ yang panjang dan relatif lemahnya nasionalisme tradisional Australia telah membuka mata masyarakat Australia untuk memilih opsi multikulturalisme. Munculnya Multikulturalisme sebagai ideologi negara di tahun 1973 merupakan salah satu titik balik (*turning point*) dalam babak sejarah Australia. (Lopez, 2000:1).

Multikulturalisme Australia yang berkembang secara bertahap dan memerlukan waktu yang panjang sejak tahun 1960-an telah mengundang wacana publik umum Australia tentang apa bentuk model masa depan ideologi negara. Di antaranya berpendapat bahwa multikulturalisme dan etnisitas merupakan suatu ancaman bagi bangsa dan budaya Anglo-Australia. Pendapat lain mengatakan, justru ideologi multikultural dan etnisitas mampu memecahkan asalah hak-hak sosial, politik, dan ekonomi kelompok minoritas. Ada juga yang berpendapat bahwa kekuatan identitas nasional Australia yang bersifat rasis menjadi rapuh dengan berkembangnya multikulturalisme. (Vasta, 1993: 209)

Salah satu aspek dalam masyarakat Australia yang mempengaruhi sikap Pemerintah dalam mengambil kebijakan multikulturalisme adalah realitas komposisi demografinya. Tatanan ini terdiri dari berbagai kelompok etnik, budaya dan latar belakang agama yang beragam. Sebagai jawaban pada sifat multikultural masyarakatnya, Pemerintah Australia di tahun 1973 menganut ideologi multikulturalisme sebagai kebijakan resmi terhadap kaum migran. Akibatnya terasa pada tiap kelompok masyarakat dalam hal kebebasan untuk memelihara dan mempertahankan identitas budaya mereka. Ini merupakan ideologi yang sangat signifikan dalam kaitan dengan masyarakat Muslim di Australia yang membentuk sebuah kelompok yang menonjol dalam lingkup nilai-nilai Islami.

Pada dasarnya sejak awal pendudukannya di Australia di tahun 1788, masyarakat Australia telah bersifat multikultural dengan beragamnya kelompok agama dan suku bangsa baik dari kalangan Katolik/ Anglikan, Irlandia, Inggris dan Cina (1850). Namun sikap ini tidak berlangsung lama dengan dikeluarkannya kebijakan imigrasi yang ketat (*Immigration Restriction Act*) di tahun 1901, yang lebih dikenal dengan *White Australian Policy* terhadap masyarakat non-Eropa. Undang-undang ini sangat rasis

dan diskriminatif dalam perolehan hak naturalisasi dan peluang kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi penurunan jumlah penduduk yang signifikan, terutama kelompok minoritas Muslim. (Castles, et al, 1988:45).

Respons selanjutnya dari pihak pemerintah Australia terhadap kaum migran tercermin dalam ideologi asimilasi (1945-65) dan dilanjutkan dengan ideologi integrasi (1966-1977). Kebijakan awal asimilasi menganggap bahwa kaum migran tak akan bisa melepaskan cara hidup lama mereka untuk kemudian menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan budaya ala Anglo-saxon (Martin, 1978:207), yang diistilahkan oleh Price sebagai *Anglo conformism*. (Begum, 1984:80).

Sebuah survei sejarah tentang interaksi antara berbagai budaya etnik dan budaya dominan Anglo di Australia menunjukkan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan migran Australia, kelompok-kelompok etnik lain itu diharapkan membaaur dengan kelompok dominan Anglo. Dalam kondisi membaaur itu, nilai-nilai hegemoni Anglo menjadi rujukan utama, sedangkan komponen dari etnik minoritas hanya mengisi bagian sisa yang sebenarnya tak dikehendaki. Dalam Situasi seperti ini makanan etnik pun dicurigai, bahasa asal etnik dianggap kurang intelektual dan tidak menguntungkan baik secara sosial maupun politik. Asimilasi menjadi lahan subur tumbuhnya etnosentrisme, yang hanya meyakini validitas satu sistem budaya.

Sikap ini kemudian berganti di tahun 1960an dengan kebijakan integrasi yang tidak jauh berbeda dengan ideologi asimilasi. Kecenderungan ini dimaksudkan untuk memberi ruang toleransi kepada perbedaan-perbedaan budaya. Namun ternyata kerap pula mendorong munculnya perbedaan-perbedaan. Selama kurun waktu ini, wacana ideologi multikultural muncul menjadi topik pembicaraan publik, khususnya di kalangan akademis.

Ideologi multikultural kemudian menjadi sebuah gerakan yang mendorong terwujudnya perlindungan identitas budaya kelompok etnis minoritas. Sejumlah faktor yang menyebabkan perubahan ideologis ini, antara lain: (a) fluktuasi komposisi populasi kaum migran yang besar, (b) percepatan migrasi yang mengakibatkan membengkaknya arus imigran dan (c) munculnya perubahan pandangan di pihak masyarakat kulit putih tentang kesetaraan/ keadilan terhadap kelompok minoritas.

Istilah multikulturalisme dipahami secara beragam oleh para pemikir Australia sendiri, seperti diakui oleh Normal Habel. Ada yang menganggapnya dalam pengertian netral tentang sebuah kenyataan sosial adanya kelompok-kelompok masyarakat dari beraneka budaya yang tinggal menetap bersama –senang atau tidak senang– di sebuah negeri. Ada pula yang menganggap multikulturalisme sebagai sebuah tatanan sosial ideal berupa lambang dari prinsip-prinsip keadilan sosial yang mengemukakan tentang hak-hak, nilai dan kesetaraan kelompok dari berbagai tradisi budaya dan etnik. Multikulturalisme tidak hanya berkait dengan masalah toleransi, tetapi juga penerimaan dengan baik budaya lain sebagai sesuatu yang mempunyai nilai yang sama untuk dikembangkan di masyarakat. Habel, 1992:12).

Di pihak lain ada yang menganggap multikulturalisme menunjuk pada sebuah bentuk rekayasa sosial agenda politik. Konsep ini pertama kali dipakai oleh pemerintahan PM Whitlam tahun 1972, selanjutnya dikembangkan secara tertulis antara lain dalam Laporan Galbally (*Galbally Report*) tahun 1978 yang menyatakan bahwa tiap orang harus bisa memelihara budayanya sendiri tanpa diganggu prasangka atau perusakan.

Multikulturalisme bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang berkeadilan, bagi kelompok minoritas pendatang. *The Australian Council on Population and Ethnic Affairs* (1982:12) menyebutkan ada empat prinsip yang menjadi indikator keberhasilan ideologi multikultural, yaitu:

- 1) Perikat sosial (*social cohesion*): aneka kelompok berinteraksi dengan berbagai cara guna mencapai kebutuhan bersama. Kompetisi dan ketegangan-ketegangan yang bisa saja terjadi pada umumnya lebih bersifat kreatif ketimbang destruktif. Ini berlaku baik pada kelompok yang bersifat politis, ekonomis ataupun keolahragaan. Kompetisi yang terjadi kemudian diselesaikan melalui proses yang telah terlembaga dan standar perilaku yang sudah diterima. Hal serupa juga terjadi dalam kompetisi antar kelompok etnis di suatu masyarakat multikultural. Setiap anggota masyarakat tunduk dan mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Australia. Setiap kelompok tidak diperbolehkan untuk membuat peraturan hukum dan lembaga politik sendiri, karena hal ini akan mengancam eksistensi negara Australia sebagai perikat bangsa.

- 2) Identitas budaya (*cultural identity*): hak masyarakat Australia dijamin dan diperbolehkan untuk mengekspresikan dan mewarisi budaya masing-masing, termasuk bahasa dan agama.
- 3) Persamaan kesempatan dan Akses (*equality of opportunity and access*): masyarakat Australia diberi kesempatan dan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan pekerjaan tanpa memperdulikan latar belakang ras, etnik, budaya, agama, bahasa, gender dan tempat kelahiran.
- 4) Rasa Tanggungjawab, Komitmen, dan Partisipasi yang Sama (*Equal Responsibility, commitment and Participation*): prinsip ini mengharuskan kelompok minoritas Australia untuk setia kepada negara melalui rasa tanggung jawab dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan berpegang teguh kepada ideologi multikultural.

Agama dan Multikulturalisme

Pokok bahasan multikulturalisme memperoleh dimensi baru di kala pertanyaan tentang agama atau sub budaya agama menjadi wacana perdebatan. Sebagai sebuah kebijakan Pemerintah Australia, multikulturalisme kelihatannya dianggap sebagai sebuah idealisme sekuler. Dalam kepala banyak politisi dan pemimpin-pemimpin akademik Australia tampaknya ada semacam keyakinan $\frac{3}{4}$ atau katakanlah sebuah harapan $\frac{3}{4}$ bahwa komponen agama dalam kebudayaan itu bersifat urusan pribadi. Pada saat kebijakan multikulturalisme harus berhadapan dengan nilai-nilai publik; bagi kaum politisi Australia umumnya, agama diletakkan di belakang pintu yang tertutup.

Namun demikian, agama merupakan bagian dari budaya Australia. Agama sebagai bagian dari budaya yang tak terpisahkan dari Sistem nilai masyarakat Australia yang sedang mengalami perubahan. Agama telah mempengaruhi kehidupan orang –dalam pengertian baik ataupun buruk– sejak pertama kali kaum Eropa datang ke daratan ini. Agama orang Aborigin Australia sekarang mulai mempengaruhi cara berpikir sebagian orang Australia khususnya dalam lingkup keadilan ekologis (*ecojustice*) dan spiritualitas.

Untuk membahas agama dalam konteks multikulturalisme, menurut Robert Crotty, harus dimulai dari pembahasan mengenai makna kebudayaan. Meminjam definisi budaya Geertz, Crotty beranggapan bahwa kebudayaan pada dasarnya adalah sebuah sistem simbol yang diwariskan

turun temurun. Kebudayaan bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri, bukannya statis atau deterministik. Kebudayaan memberikan ketertiban di dunia di mana baik kelompok maupun individu bisa memperoleh maknanya sendiri-sendiri. Multikulturalisme adalah sebuah kebijakan yang mencari cara memelihara berbagai bentuk budaya dalam sebuah masyarakat tertentu. (Habel, 1992:31).

Tiap agama harus dilihat sebagai sebuah sistem budaya yang menawarkan ketertiban dan pemaknaan pada titik-titik kritis munculnya ancaman kekacauan (*chaos*). Kebenaran yang Mutlak (*Ultimacy*) adalah representasi simbolik dari ketertiban dunia dan maknanya itu yang ketertiban dan pemaknaan yang kita jumpai sehari-hari. Tiap individu dalam masyarakat dunia sekuler dihadapkan dengan sederet budaya agama dan budaya dunia sekuler yang bisa saja mempunyai pandangan-pandangan dunia yang saling bertabrakan. Keragaman ini menyebabkan kemungkinan pluralisme agama di mana semua budaya agama diakui sebagai sebuah varian namun juga menjadi simbolisasi Kebenaran Yang Mutlak (*The Ultimate*).

Crotty lebih lanjut memperkenalkan sebuah kerangka nilai-nilai yang besar yang bisa disandang bersama oleh budaya dominan dan budaya-budaya minoritas dalam sebuah masyarakat tertentu. Dalam konteks ini asimilasi berupaya mengubah secara bertahap semua budaya minoritas agar bisa cocok dengan adonan dalam budaya dominan. Separatisme — lawan kata dari asimilasi— mencari cara untuk melindungi kantong-kantong kelompok budaya yang dipelihara. Multikulturalisme sebagai sebuah alternatif, menawarkan sebuah kebijakan interaksi dan pengayaan timbal balik baik pada budaya dominan maupun budaya minoritas yang terkait. Pluralisme agama menawarkan sebuah kebijakan yang analog dengan kebijakan interaksi.

Para pengamat agama berpendapat setidaknya terdapat tiga Sikap mental dalam kehidupan beragama. Pertama, eksklusivisme, yaitu pandangan bahwa budaya agama tertentu yang hanya memiliki kebenaran, karena ia satu-satunya yang mempunyai kebenaran simbol yang hakiki dan cara-cara yang tepat untuk memelihara hubungan dengan kebenaran mutlak itu. Kedua, inklusivisme, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa satu budaya agama yang benar, walaupun budaya agama lain bisa saja memiliki kebenaran meskipun hanya sebagian dibanding dengan budaya mereka. Ketiga, pluralisme, yang berpendapat bahwa semua budaya agama itu

benar. Semua agama dianggap mempunyai kebenaran sejauh menyangkut simbol yang Mutlak. (Habel, 1992:37-38).

Dalam konteks multikulturalisme, etnosentrisme dan eksklusivisme agama menghadirkan tantangan-tangan besar. Etnosentrisme menolak pemyangungan masyarakat multikultural sehingga menjadikannya ancaman. Demikian juga dengan eksklusivisme agama, sebuah perkiraan pengetahuan tentang kebenaran dan sistem simbol satu-satunya yang diakui, berubah menjadi sebuah ajaran keimanan dan sebuah strategi budaya dominan. Kedua cara pendekatan ini berujung pada konflik. Saat pendekatan-pendekatan itu muncul, kenyataan sebuah masyarakat multikultural yang harmonis mungkin hanya jadi impian belaka.

Sikap etnosentris masyarakat Australia terhadap etnik minoritas non-Eropa merupakan salah satu sebab utama pembalikan dari ideologi asimilasi menjadi multikulturalisme. Etnosentrisme dianggap sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni budaya Anglo dari ancaman budaya etnik para migran. Begitu pula bentuk eksklusivisme agama merupakan strategi untuk melindungi dominasi 'agama', politik dan ekonomi (Kristen Anti-Semit).

Implikasi Multikulturalisme terhadap Islam

Pada dasarnya multikulturalisme adalah semacam bentuk pelayanan (*service*) terhadap kelompok minoritas. Dengan kebijakan ini, seorang Muslim diharapkan -termasuk etnik agama lainnya — bisa saja menjadi “*a real Australian*”, dan tidak harus menjadi “*a typical Australian*”. Pelayanan itu berbentuk kebijakan pendidikan multikural sejak tingkat pendidikan dasar sampai menengah, kesehatan, pemukiman, subsidi, pendidikan/ pengajaran multi-lingual, hukum, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bagi kelompok Muslim, ideologi ini merupakan “pintu gerbang untuk memperkenalkan pemahaman dan pengertian Islam yang sesungguhnya kepada khalayak masyarakat kulit putih yang selama ini ‘*ignorant*’ dan ‘*intolerant*’ terhadap Islam.

Ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat Muslim Australia di dalam merespons kebijakan tersebut, antara lain kurangnya kemampuan bahasa Inggris, kurangnya keahlian (*skill*), fragmentasi kelompok agama yang terpusat pada latar belakang etnis, dan dangkalnya interpretasi terhadap ajaran Islam, dikarenakan latar belakang negara asal yang dilanda peperangan (Lebanon dan Irak). Diperlukan pemahaman baru bagi

masyarakat Muslim Australia dalam menafsirkan ajaran-ajaran pokok Islam yang bersifat *transcendental universalism* atau *transcultural universalism* sehingga bisa hidup berdampingan dengan multikulturalisme di negara-negara Barat. Mengutip pendapat Prof. Dr. Taufik Abdullah dalam seminar *Islam and the West*, 11-12 September 2002, menegaskan, bahwa multikulturalisme merupakan alternatif untuk memecahkan masalah “*clash of civilization*” antara Islam dan Barat. Dengan kata lain, perpaduan *transcendental universalisms* dengan multikulturalism bisa menghindari konflik antara *religious culture* dan *secular culture*”.

Namun perlu disadari, bahwa multikulturalisme Australia menurut para kaum akademikus dan publik umum, di dalam kenyataan masih bersifat retorika, ideologi politik, antara teori dan praktik berbeda, belum menjadi sebuah komitmen yang kuat. Tidak heran, bila masih banyak dijumpai pengalaman diskriminatif terhadap kelompok minoritas, terutama terhadap Islam.

Multikulturalisme Indonesia?

Dalam sejarah Indonesia, ketegangan dan konflik etnis, agama, budaya, dan politik telah menjadi bagian dari potret interaksi masyarakat. Sejak menjelang kemerdekaan hingga era reformasi, perbedaan tidak berhenti pada sekedar perbedaan yang dihargai. Perbedaan primordial sering menjelma menjadi pertentangan, sehingga pada gilirannya melahirkan ketidaknyamanan hidup bersama. Pergantian rezim seakan tidak berarti pergantian mental dan budaya konflik dan kekerasan. Sementara masyarakat tidak juga merasa menjadi bagian dari upaya menciptakan kehidupan harmonis dalam perbedaan itu.

Tidak hanya kekerasan dan konflik horizontal semacam itu. Kekerasan struktural (*state violence*) yang dilakukan negara (pemerintah) yang bentuk puncaknya adalah *state terrorism* terus memperumit masalah interaksi horizontal. Masyarakat yang cenderung tidak menghargai perbedaan seringkali dipengaruhi oleh kekerasan-kekerasan pemerintah dan aparaturnya, selain tentu saja elite-elite dan tokoh-tokoh politik dan agama.

Ide persatuan nasional, meski sering sangat efektif untuk meredam keinginan berpisah dan bercerai atau sekedar berontak, ternyata bagi banyak kelompok masyarakat berfungsi lebih sekedar untuk menakut-nakuti. Harapan sebagian besar masyarakat untuk dihargai identitas, agama, etnis,

kelompok politiknya tidak kunjung dipenuhi hanya dengan slogan “Persatuan Nasional”.

Slogan lain Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu telah kehilangan daya gebrak tentang pentingnya hidup bersama dalam perbedaan. Tunggal Ika lebih ditekankan ketimbang Bhineka, sehingga akhirnya melahirkan persatuan semu (*psedo-unity*). Dengan kata lain, Bhineka Tunggal Ika belum mampu secara efektif mengakomodir perbedaan masyarakat Indonesia. Hal ini juga terlihat pada prinsip monokulturalisme yang cenderung digunakan pada rezim Soeharto terlihat kurang menghargai kebinekaan, tetapi lebih mementingkan Tunggal Ika. Di sini, barangkali perlu pelurusan pengertian atau penerjemahan istilah warisan budaya ini dengan memasukkan kesadaran multikultural yang berarti pengakuan dan penerimaan pada kenyataan keragaman budaya di antara kita, di samping tetap perlunya suatu kesatuan.

Saat ini kita menghadapi problem etnis yang ditandai oleh hilangnya tiga komponen tegaknya negara Indonesia, yaitu *identitas budaya, kesetaraan sosial dan kohesi sosial*. Hal ini pada akhirnya memunculkan suasana dilema etnis, adanya disorientasi rujukan nilai-nilai kebangsaan. Konflik agama dan mungkin juga ras (?) bisa dijadikan contoh. Untuk itu, barangkali pemerintah perlu membentuk Komisi Urusan Etnis (*Ethnic Affairs Commission*) untuk dijadikan semacam *social engineering* untuk mereformasi multikulturalisme Indonesia dengan menyusun sebuah agenda Nasional bagi terwujudnya multikulturalisme bangsa. Bila perlu mengganti nama Menteri nondepartemen yang mengurus percepatan pembangunan daerah bagian Timur menjadi Menteri urusan Multikultural dan pembangunan daerah dalam pengertian yang luas.

Daftar Bacaan

- Advisory Council on Multicultural Affairs, *Towards a National Agenda for a Multicultural Australia: A Discussion Paper*, Commonwealth of Australia, Canberra, 1988
- Australian Council on Population and Ethnic Affairs, *Multiculturalism for All Australians: Our Developing Nationhood*, Commonwealth of Australia, 1982
- Black, Alan (ed.), *Religion in Australia: Sociological Perspective*, Allen and Unwin Sydney, 1991
- Begum, Khalida, *Islam and Multiculturalism: With Reference to Muslims in Victoria*, unpublished Dissertation, Monash University, 1984
- Bouma, Gary D., *Mosque and Muslim Settlement in Australia*, Australian Government Printing Service, Canberra, 1994
- Carens, Joseph H. & Melissa William S., 'Muslim Minorities in Liberal Democracies: The Politic of Misrecognition', in Rainer Baubock (at all), *The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration*, Avebury, England, 1996
- Castles, Stephen (ed.), *Mistaken Identity: Multiculturalism and Demise of Nationalism in Australia*, Pluto Press, Sydney, 1988
- Cleland, Bilal, *The Muslims in Australia: A Brief History*, unpublished paper, Melbourne, October, 2000
- Département of Prime Minister and Cabinet Office of Multicultural Affairs, *National Agenda for a Multicultural Australia*, Australian Government Publishing Service, Canberra, 1989
- Vasta, Ellie, "Multiculturalism and Ethnic Identity: The Relationship between Racisms and Resistance", in *Australian and New Zealand Journal of Sociology*, vol. 29, no. 2, August 1993, p. 209
- Habel, Norman C. (ed.), *Religion and Multiculturalism in Australia*, Australian Association for the Study of Religious (AARS), Adelaide, 1992
- Jones, Mary Lucille, *An Australian Pilgrimage: Muslims in Australia from the Seventeenth Century to the Present*, The Law Printer, Melbourne, 1993
- Jupp, James, 'One among Many', in David Goodman (at all), *Multicultural: The Challenge of Change Australia*, Scribe, Victoria, 1991
- Lopez, Mark, *The Origins of Multiculturalism in Australian Politics 1945-1975*, Melbourne University Press, Melbourne, 2000

Martin, Jean I., *The Migrant Presence: Australian Responses 1947-1977*,
George Allen & Unwin, Sydney, 1978

M. Amin Nurdin adalah Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004